



## Pengalihan Tahanan Rai Suta Belum Dikabulkan

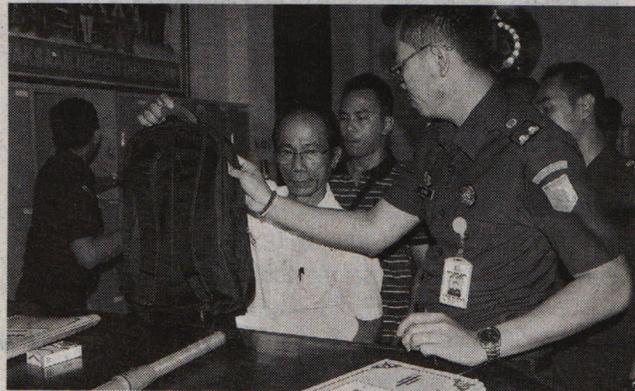
DENPASAR, TRIBUN BALI

- Sepekan pasca permohonan pengalihan penahanan mantan sekretaris dewan (sekwan) DPRD Denpasar, Gusti Rai Suta, hingga kini masih belum dikabulkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar masih mempertimbangkan permohonan yang ditandatangani 30 warga ini.

Kasi Intel yang juga Humas Kejari Denpasar, IGA Kusumayasa Diputra saat ditemui, Senin (6/3) mengatakan permohonan masih dipertimbangkan dulu. "Surat permohonan yang diajukan sudah kami terima dan diserahkan ke pimpinan. Tapi masih kami pertimbangkan," jelasnya. Soal kapan ada kepastian ditolak atau diterima permohonan ini masih harus ditunggu. Pihaknya punya alasan subyektif dan obyektif terkait permintaan tersebut.

Mantan Kasi Intel Kejari Buleleng ini menyatakan, diajukannya surat permohonan oleh warga adalah hak dari warga. Pun tersangka juga memiliki hak mengajukan penangguhan atau peralihan penahanan. "Itu sah saja dan adalah hak dari tersangka atau warga mengajukan peralihan penahanan. Namun keputusan tetap di pimpinan kami, entah dikabulkan atau tidak," jelas Kusumayasa.

Sebelumnya, dua warga yang



TRIBUN BALI/I PUTU CNDRA

**DITAHAN** - Mantan Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Denpasar, Gusti Rai Suta saat akan ditahan di LP Kerobokan, sepekan lalu.

mewakili 30 warga Tangeb mendatangi Kejari Denpasar, Jumat (3/3) lalu. Kedatangan perwakilan warga yaitu Made Swastika selaku sekretaris, dan Nyoman Sare sebagai bendahara kepengurusan Desa Pekraman Tangeb untuk mengajukan pengalihan penahanan Rai Suta.

Warga memohon kepada Kejari Denpasar agar penahanan Rai Suta bisa dialihkan, dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar di Kerobokan ke tahanan rumah. Dalam surat permohonan peralihan yang diajukan warga, karena Rai Suta yang menjabat sebagai Bendesa Adat Pekraman Tangeb tenaga dan pikiran masih sangat dibutuhkan.

Pun dalam surat permohonan itu, warga menjamin Rai Suta yang terjerat dalam kasus perjalanan dinas (perdin) DPRD Denpasar ini tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

"Intinya 30 warga Tangeb menandatangani surat permohonan pengalihan penahanan. Para warga menjamin bahwa bendesanya tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti atas perkara yang disangkakan kepada Rai Suta. Tidak mungkin lah Rai Suta melarikan diri, karena beliau bendesa adat dan memiliki tempat tinggal tetap di Bali," terang anggota tim kuasa hukum Rai Suta, yaitu Ketut Rinata. (can)

Edisi : Selasa, 7 Maret 2017

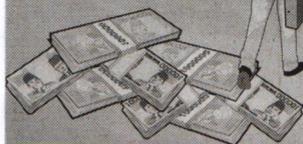
Hal : 5



# Usut Dugaan Penyelewengan BKK

Kejari Periksa Perbekel, Bendesa, dan 10 Warga ■ Pertanggungjawaban Tak Sesuai Realisasi

## STORY HIGHLIGHT



● Kejari Tabanan bidik dugaan penyelewengan BKK di Desa Candikuning

● Sudah periksa perbekel, bendesa, dan 10 warga

● Kejari sudah minta data dari Dinas Kebudayaan Provinsi

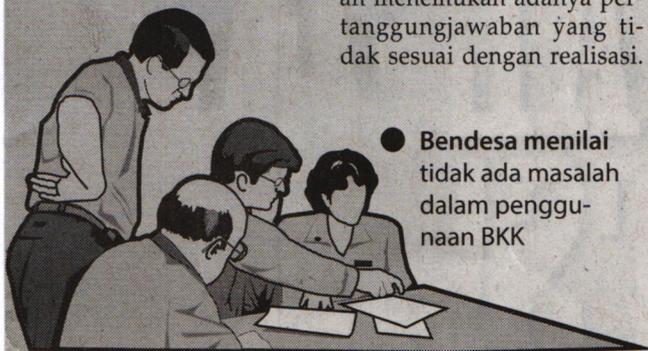
● Ada temuan pertanggungjawaban yang tak sesuai realisasi

TABANAN, TRIBUN BALI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan membidik kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti senilai Rp 200 juta. Penyelidikan kasus tersebut telah dimulai sekitar tanggal 21 Februari 2017. Perbekel, bendesa, dan 10 warga Candikuning telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Hari ini (kemarin, Red) kami sudah minta data dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Beberapa pihak telah kami mintai keterangan, sudah dari perbekel, bendesa pakraman dan 10 warga desa," ungkap Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabanan, Ida Bagus Alit Ambara Pidada, Senin (6/3).

Disebutkan, Kejari Tabanan menemukan adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi.

● Bendesa menilai tidak ada masalah dalam penggunaan BKK



INFOGRAFIS: TRIBUN BALI/DWI SUPUTRA

BKK merupakan dana yang diberikan oleh Provinsi Bali kepada kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada desa. "Indikasinya ada pertanggungjawaban yang tidak sesuai," kata dia.

Saat ini, Kejari Tabanan masih melakukan pengumpulan bukti dan keterangan terkait kasus tersebut. Kendati ditemukan adanya ketidaksesuaian pertanggungjawaban dengan realisasi, belum ada rencana penetapan tersangka.

"Karena kasus masih didalami, masih penyelidikan, apakah ada unsur pidana atau tidak," jelasnya.

Perbekel Desa Candikuning, I Made Mudhita membenarkan dirinya telah dimintai keterangan oleh jaksa di Kejari Tabanan. Ia ditanya ihwal seputaran kewenangannya sebagai perbekel dalam pengelolaan BKK. "Saya ditanya seputaran kewenangan, saya sampaikan yang sebenarnya," ungkapnya.

Namun, ia mengaku lupa kapan datang ke kantor Kejari Tabanan. "Benar saya telah dimintai keterangan, tapi saya lupa waktunya. Kalau tidak salah bulan Februari," jelasnya. (arg)

## Tak Ada Masalah

**BENDESA** Pakraman Candikuning I Made Susila Putra menilai proses penggunaan dana BKK di desanya tidak ada masalah. "Saya kira tidak ada masalah, terkait dengan pemanggilan, saya sebagai pelaksana harus datang," ujarnya.

Begitu juga tentang proses penggunaan dana BKK tersebut. Susila menganggap penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan, mulai dari penyaluran hingga penggunaannya. "Saya rasa

dari pemeriksaan tidak ada masalah," kata dia.

Budiantara, staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang membawa data terkait BKK provinsi Bali ke kantor Kejari Tabanan mengaku membawa data terkait BKK di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti.

"Iya, saya bawa data BKK Des Candikuning, selebihnya tidak tahu apa-apa," kata pria asal Banjar Penyalin, Kerambitan tersebut. (arg)

Edisi : Selasa 7 maret 2017.

Hal : 17.